

BAB I

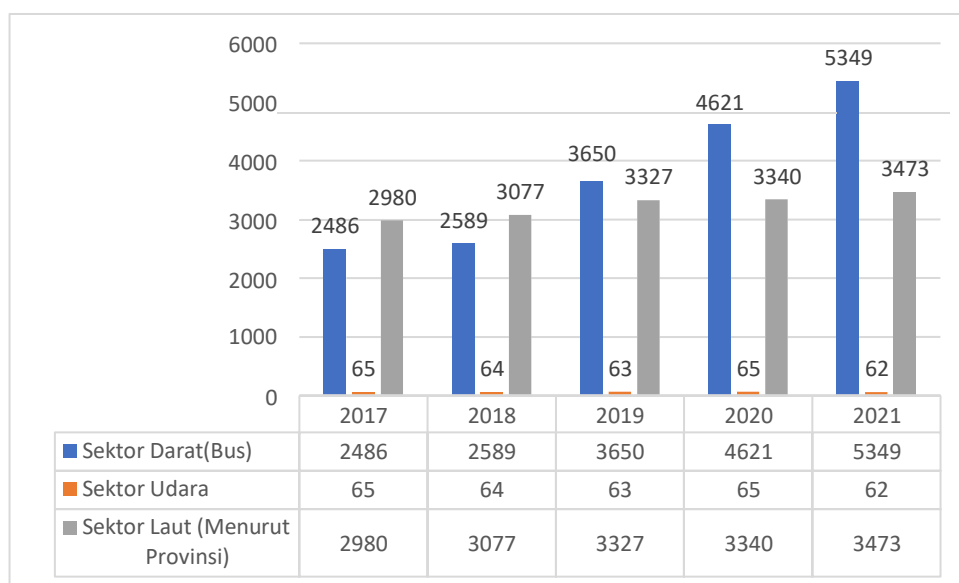
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai salah satu regulator yang menjadi penyelenggara perdagangan di Pasar Modal Indonesia menyediakan berbagai solusi produk Data Pasar dikembangkan untuk memberikan informasi kepada publik agar dapat membuat keputusan yang tepat. Melakukan penawaran jual dan beli secara teratur, wajar, dan efisien. Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan *IDX Industrial Classification* atau *IDX-IC* untuk mengklasifikasikan Perusahaan Tercatat. Penentuan sektor, sub-sektor, industri atau sub-industri didasarkan pada eksposur pasar. Dalam klasifikasi BEI yang baru ini yaitu *IDX-IC* memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri. Diantaranya yaitu sektor Energi (*Energy*), Barang Baku (*Basic materials*), Perindustrian (*Industrials*), Barang Konsumen Primer (*Consumer Non-Cyclicals*), Barang Konsumen Non-Primer (*Consumer Cyclicals*), Kesehatan (*Healthcare*), Keuangan (*Financials*), Properti & Real Estat (*Properties & Real Estate*), Teknologi (*Technology*), Infrastruktur (*Infrastructures*), Transportasi & Logistik (*Transportation & Logistic*), dan Produk Investasi Tercatat (*Listed Investment Product*).

Objek dalam penelitian ini adalah Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Daftar saham Transportasi & Logistik, berada dalam sektor K di *IDX Industrial Classification*. Sektor Transportasi dan logistik mencakup perusahaan yang berperan dalam aktivitas perpindahan dan pengangkutan seperti Penyedia Transportasi serta Perusahaan Penyedia Jasa Logistik dan Pengantaran. Terdiri dari maskapai penerbangan, pengangkutan laut penumpang, kereta api, transportasi jalanan, dan logistik & pengantaran. Indonesia dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sehingga sektor transportasi dan logistik berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Sektor transportasi membantu menghubungkan

koneksi antara satu tempat ke tempat lain, sehingga meningkatkan perekonomian. Grafik pada gambar 1.1 merupakan penjelasan bagaimana pertumbuhan jumlah perusahaan sektor transportasi dan logistik dalam negeri (Darat, Udara, dan Laut) tahun 2017 -2021.



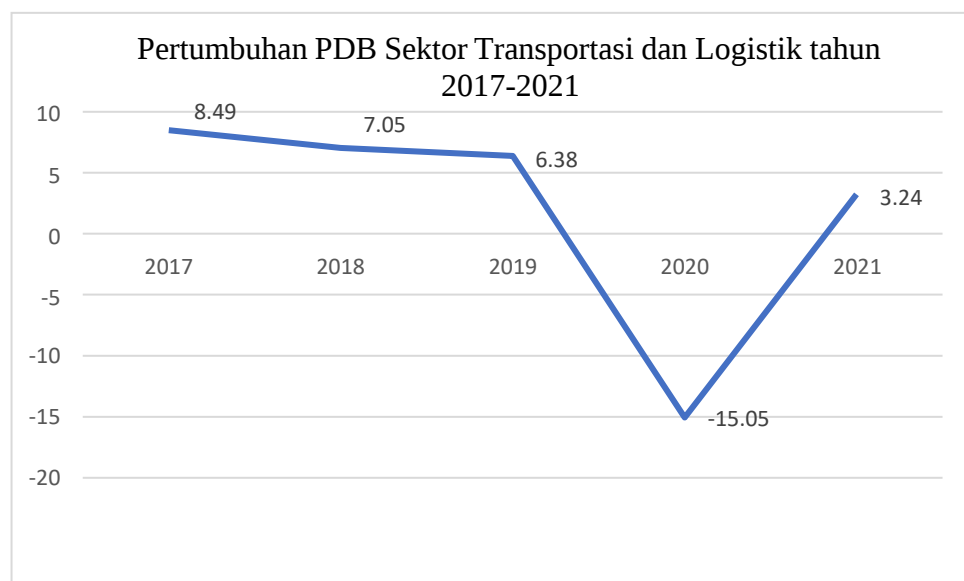
Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Perusahaan Sektor Transportasi di Indonesia Periode 2017-2021

Sumber: dephub.go.id (Tahun 2021) dan diolah Kembali oleh penulis 2023

Dari grafik diatas, menunjukkan jumlah perusahaan sektor transportasi untuk periode 2017-2021. Pada data tersebut menunjukkan jumlah perusahaan yang terus menunjukkan kenaikan jumlah perusahaan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah perusahaan dalam sektor transportasi mengindikasi bahwa prospek bisnis yang menjadi kebutuhan penting dalam menjalankan kegiatan sehari-hari baik di darat, laut, dan udara. Pada data tersebut jumlah perusahaan pada sektor penerbangan jauh lebih rendah dibandingkan sektor darat maupun laut. Sektor darat (bus) dan sektor laut menunjukkan kenaikan jumlah perusahaan setiap tahunnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa selama tahun 2018 tercatat nilai transaksi *e- commerce* yaitu sebesar Rp17,21 triliun dari 24.821.916 transaksi dan 19,66%

dari data tersebut mengandalkan jasa kurir. Hal tersebut menunjukkan jasa transportasi dan logistik merupakan elemen penting dalam pengembangan ekonomi nasional (Biro Komunikasi Kemenko Marves, 2020).

Sektor transportasi dan logistik berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini didukung oleh data yang dirilis oleh Badan Statistik dan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 sektor transportasi dan logistik melaporkan kontribusi tertinggi pada persentase PDB (Badan Pusat Statistik, 2020). Berikut Gambar 1.2 merupakan ilustrasi dari grafik pertumbuhan PDB sektor transportasi dan logistik tahun 2017 s.d. 2021.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan PDB Sektor Transportasi dan Logistik

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021) dan diolah kembali oleh penulis 2023

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sektor transportasi dan logistik menjadi paling tertinggi yaitu mencapai 8.49%, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yaitu mencapai 7.05% dan 6.38%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -15.05%.

Penurunan pertumbuhan PDB sektor transportasi dan logistik disebabkan pandemik covid-19 dimana masyarakat dilarang untuk bepergian karena adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah. Beberapa aturan memberi dampak terhadap kondisi ekonomi sektor transportasi dan logistik. Tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 3.24% Jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, PDB sektor transportasi dan logistik tumbuh 3,24% menjadi Rp406,19 triliun pada 2021 dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sedalam -15,05% .

Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan pada sektor transportasi dan logistik merupakan perusahaan yang menjadi faktor pendukung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena mampu mengalami peningkatan. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi di sektor transportasi dan logistik sehingga perusahaan harus memiliki manajemen yang baik, karena dengan adanya manajemen yang baik maka perusahaan dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan klien terhadap perusahaan sektor transportasi dan logistik. Auditor sangat penting untuk melaporkan kinerja perusahaan. Kebutuhan untuk adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal semakin meningkat bahkan sangat diperlukan untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan operasi perusahaan terutama dalam *audit fee*. Auditor harus melaksanakan prosedur audit atas audit laporan keuangan untuk mencegah yang merusak independensi auditor eksternal sebagai jasa profesional.

1.2 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan memiliki fungsi terutama untuk menginformasikan penggunaannya terutama pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Manajemen perusahaan memiliki akses pada informasi keuangan mengenai pertumbuhan dan keuangan perusahaan yang tersaji dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang tersaji oleh perusahaan harus memiliki kualitas yang baik (Sibuea & Arfianti, 2021).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Akuntan publik bertanggung jawab dalam memberikan keyakinan yang memadai kepada pemakai laporan keuangan bahwa laporan yang disajikan oleh perusahaan telah bebas dari salah saji yang material dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik yang disajikan oleh manajemen lebih terjamin, untuk menghindari laporan keuangan tersebut merugikan pemakai laporan keuangan (Yulianti et al., 2019).

Audit fee merupakan jasa akuntan publik yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dapat menyebabkan timbulnya biaya atas audit laporan keuangan yang dibebankan kepada perusahaan *auditee* (Yulianti et al., 2019). Menurut (Melinda & Triyanto, 2021) *audit fee* adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan untuk memakai jasa auditor eksternal, besarnya biaya tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Biaya didapatkan berasal dari proses tawar-menawar dengan perusahaan klien.

Pada tanggal 27 Januari 2016, IAPI mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang penetapan imbalan jasa audit laporan keuangan. Akuntan publik menggunakan aturan ini sebagai pedoman dalam menentukan besaran biaya audit atau imbalan jasa atas pelaksanaan audit. Peraturan ini menyatakan bahwa jika biaya jasa audit laporan keuangan yang dibebankan terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman terhadap auditor yaitu berupa kepentingan pribadi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya penerapan prosedur di bawah standar. Maka, akuntan publik harus mengambil tindakan pencegahan dengan menerapkan biaya audit yang memadai untuk melaksanakan prosedur

audit atas audit laporan keuangan mencegah yang bisa merusak independensi auditor eksternal sebagai jasa profesional (IAPI, 2016).

Audit fee yang besar tidak menjamin kegiatan audit yang dilakukan menjadi terhindar dari tindak kecurangan. Berdasarkan kasus yang dialami oleh PT Garuda Indonesia dapat dilihat dari kasus yang melibatkan Kasner Sirumapea yang merupakan Akuntan Publik (AP) dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited). Kasner diberikan sanksi pembekuan izin selama 1 tahun atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk periode 2018 terkait perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas PT Citilink Indonesia yang merupakan anakperusahaan PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi. Tindakan fraud dan pelanggaran kode etik profesi akuntan publik tetap terjadi meskipun pada saat itu *audit fee* yang dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia Tbk kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan sebesar Rp4,992 miliar (CNBC Indonesia, 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan pada tugas auditor sebelumnya dalam menilai kesesuaian penerapan PSAK perusahaan. Meskipun demikian, berdasarkan laporan tahunan perusahaan, justru *fee* yang diperoleh oleh auditor semakin naik. Pada saat terjadi skandal kesalahan keuangan justru perusahaan tetap memberikan *fee* yang lebih besar. Penggunaan jasa audit diharapkan mampu memberikan opini yang sesuai dengan kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan.

Tabel 1. 1 Perubahan *Professional Audit Fee* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik Tahun 2017-2021

Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun	<i>Professional Audit Fee</i>
PT. Blue Bird Tbk	BIRD	2017	Rp18.477.000.000
		2018	Rp31.894.000.000
		2019	Rp17.569.000.000
		2020	Rp15.486.000.000

(Bersambung)

(Sambungan)

		2021	Rp12.188.000.000
PT. Mitra International Resources Tbk	MIRA	2017	Rp239.608.765
		2018	Rp462.546.375
		2019	Rp513.100.000
		2020	Rp284.100.000
		2021	Rp296.600.000

Sumber: Data yang diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan perubahan dalam 5 waktu berturut- turut meningkat ataupun menurun pada *professional audit fee* PT. Blue Bird Tbk dimana adanya perbedaan *professional audit fee* yang terjadi, pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp31.894.000.000. Pada PT. Mitra International Resources Tbk *professional fee* mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp462.546.375 dan 2019 yaitu sebesar Rp513.100.000. *Professional Audit fee* yang berubah disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah perusahaan mengganti auditor secara *voluntary*. Penurunan pada *professional audit fee* bisa terjadi karena adanya pemotongan biaya audit saat perikatan pertama kali. Sedangkan, dalam peraturan IAPI disebutkan bahwa jika biaya jasa audit laporan keuangan yang dibebankan terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman terhadap auditor yaitu berupa kepentingan pribadi dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya penerapan prosedur di bawah standar. Apabila auditor menerima *fee* yang tinggi, dikhawatirkan auditor memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa terkait fenomena auditor berhak mendapatkan *fee* yang wajar sesuai dengan imbalan jasa

per jam yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang dan dapat dijadikan acuan dalam kesepakatan untuk menentukan biaya audit oleh auditor dengan klien. Kemudian, akuntan publik harus mengambil tindakan pencegahan dengan menerapkan biaya audit yang memadai untuk melaksanakan prosedur audit atas audit laporan keuangan mencegah yang bisa merusak independensi auditor eksternal sebagai jasa profesional.

Dalam hubungannya, terdapat *managerial ownership* yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit fee*. Menurut Melinda dan Triyanto (2021) *managerial ownership* yaitu tingkat kepemilikan saham pada pihak manajemen yang aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan tersebut. Hasil yang dilakukan oleh Melinda & Triyanto (2021) dan Harahap *et al* (2018) menunjukkan bahwa *managerial ownership* berpengaruh positif terhadap *audit fee* karena semakin besar *managerial ownership* maka akan semakin besar manajemen memaksimalkan kinerjanya yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan manajemen. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam penelitian Fauzi & Laksito (2019) *managerial ownership* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Kepemilikan saham oleh manajerial dari risiko pelaporan yang meningkat karena pengendalian internal yang tidak efektif sehingga manajer menuntut kualitas audit yang tinggi untuk mengurangi risiko pelaporan sehingga biaya audit yang dikeluarkan lebih tinggi.

Selain itu, kompleksitas perusahaan menurut Huri dan Syofyan (2019) adalah hal yang berkaitan dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Dapat mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan berdasarkan rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien kantor akuntan publik untuk diaudit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Yulianti *et al.* (2019) dan Melinda & Triyanto (2021). Kompleksitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee audit*. Hasil ini membuktikan bahwa semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan maka *fee audit* yang dibebankan kepada perusahaan juga akan semakin tinggi. Sedangkan menurut penelitian Cristiansy kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee* karena adanya kemungkinan anak perusahaan menggunakan auditor yang berbeda dalam mengaudit perusahaannya sendiri sehingga kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Audit fee juga dapat dikaitkan dengan risiko perusahaan. Menurut (Sibuea & Arfianti, 2021). Risiko perusahaan yaitu kondisi dimana kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan menggunakan asset perusahaan. Risiko perusahaan diukur dengan rasio *leverage*. *Leverage* dilihat dari seberapa besar perusahaan didanai oleh hutang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasharmeh (2018) dan Yulianti *et al.* (2018) menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*, karena tingkat risiko perusahaan auditor membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kesulitan yang tinggi sehingga menyebabkan tingginya *audit fee* yang dibayarkan. Sedangkan dalam penelitian Melinda & Triyanto (2021) menunjukkan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Karena tinggi rendahnya rasio *leverage* tersebut merupakan bagian dari bisnis yang disesuaikan dengan kemampuan bersaing perusahaan dimana perusahaan tersebut memiliki cukup kemampuan untuk membayar hutangnya.

Berdasarkan fenomena dan uraian penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi terkait *audit fee*, oleh karena itu penelitian ini masih relevan untuk diteliti Kembali terkait faktor *Managerial Ownership*, Kompleksitas Perusahaan, dan Risiko Perusahaan terhadap *Audit Fee*. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh

Managerial Ownership, Kompleksitas Perusahaan, dan Risiko Perusahaan terhadap Audit Fee (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2021)”.

1.3 Perumusan Masalah

Biaya jasa audit laporan keuangan yang dibebankan terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman terhadap auditor yaitu berupa kepentingan pribadi mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik, kemungkinan terjadinya penerapan prosedur di bawah standar. Jika auditor menerima *fee* yang tinggi dikhawatirkan auditor memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Telah banyak penelitian terdahulu tentang *audit fee* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi referensi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut terkait pengaruh *managerial ownership*, kompleksitas perusahaan, dan risiko perusahaan terhadap *audit fee* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka pertanyaan terkait penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *managerial ownership*, kompleksitas perusahaan, dan risiko perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *audit fee* pada perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?
- 2) Apakah *Managerial ownership* berpengaruh secara parsial terhadap *audit fee* pada perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?
- 3) Apakah Kompleksitas Perusahaan berpengaruh secara parsial

terhadap *audit fee* pada perusahaan di sub sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?

- 4) Apakah Risiko perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *audit fee* pada perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *managerial ownership*, kompleksitas perusahaan, dan risiko perusahaan terhadap *audit fee* pada perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Managerial ownership* terhadap *audit fee* pada perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kompleksitas Perusahaan terhadap *audit fee* pada perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Risiko perusahaan terhadap *audit fee* pada perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman peneliti terkait hal yang mempengaruhi penentuan *audit fee* pada perusahaan

Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama perkuliahan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dapat tercapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi kantor akuntan publik, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan *fee* suatu perusahaan klien.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan perusahaan untuk memberikan *fee* kepada akuntan publik atas jasa yang telah diberikan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Masing-masing bab membahas materi berdasarkan standar penelitian yang telah ditentukan. Berikut adalah gambaran umum masing-masing bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian yaitu dari perusahaan sektor transportasi dan logistik tahun 2017-2021, latar belakang penelitian berkaitan dengan fenomena dari objek penelitian, perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan diantaranya *Agency Theory*, Auditor Eksternal, *Audit Fee*, *Managerial Ownership*, Kompleksitas Perusahaan, Risiko Perusahaan serta penelitian terdahulu yang melandasi penelitian, bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengujian analisis deskriptif menggunakan rasio, *mean*, min dan max. Menguji menggunakan analisis data panel, uji secara simultan (Uji F), uji secara parsial (Uji T) dan koefisien determinasi (R^2).

Selanjutnya penjelasan dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel independent *Managerial Ownership*, Kompleksitas Perusahaan, dan Risiko Perusahaan terhadap variabel dependen *Audit fee*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berupa kesimpulan hasil dari penelitian, keterlibatan penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya